



**Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau**

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA
TAHUN 2025**

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Dengan menyebut nama Allah Subhanallahu Wa ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan sehingga Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat DPRD selama lima tahun kedepan. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (R-RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyediakan rencana teknis lima tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Sekretariat DPRD.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu sehingga dokumen ini dapat diselesaikan. Akhirnya kami berharap semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance and Clean Government*) menuju Kepulauan Riau Makmur Berdaya Saing dan Berbudaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.

Tanjungpinang, Januari 2024
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



MARTIN L.MAROMON, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196703061997031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan Renja Sekretariat DPRD.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT TAHUN LALU.....	10
2.1. Evaluasi Renja Sekretariat DPRD dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD.....	10
2.2. Analisin Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.....	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD.....	25
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	40
BAB III Tujuan dan Sasaran.....	41
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2. Arah Kebijakan Tahun 2025 Berdasarkan isu strategis dan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.....	41
3.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	46
BAB V PENUTUP.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah perubahan yang berproses menuju ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terancang dan terencana. Paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terpadu atau terintegrasi. Perencanaan pembangunan ini dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data dan fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, dengan memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada serta memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh dan lengkap, namun tetap berpegang pada azas prioritas. Secara umum rancangan perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Rancangan perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Sebagaimana amanat

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap PD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-PD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD. Renstra-PD disusun dengan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sedangkan sebagai penjabaran Renstra-PD tersebut, maka PD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja-PD) untuk periode 1(satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-PD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja Sekretariat DPRD) dalam penyusunannya sudah mempedomi peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di provinsi kepulauan riau, ada 4 (empat) sub kegiatan dan 2 program terkait pengarusutamaan gender di Renja Sekretariat DPRD.

Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Renja Sekretariat DPRD) Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pada

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode 2025 yang memuat rencana arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang di dasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan dengan ke sekretariatan DPRD dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Sekretariat DPRD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ke sekretariatan DPRD. Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah diamanatkan di dalam perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), tentunya diperlukan perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk itu Sekretariat DPRD harus mampu mengambil peran secara optimal di dalam menentukan arah dan kebijakan perencanaan pembangunan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PD sejalan dengan sasaran pembangunan baik Provinsi maupun Nasional melalui membangun suatu sistem rancangan perencanaan yang partisipatif, implementatif dan terintegrasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Renja Sekretariat DPRD guna mencapai sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembar Negara RI Tahun 2017 nomor 136);
14. Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
15. Keputusan Presiden Nomor 60/P tahun 2016 tentang Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepri sisa masa jabatan 2016-2021;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarus utamaan gender;
18. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
23. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, tambahan lembaran daerah provinsi kepulauan riau tahun 2009 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepri tahun 2021-2026;
31. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
32. Peraturan Gubernur Kepulaun Riau Nomor .. Tahun 2023 tentang tentang RKPD 2025
33. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
34. Surat Edaran Gubernur Nomor B/188.5/3/BPPP/2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan;
2. Sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sebagai Sebagai dasar / acuan kelurahan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan;
4. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kelurahan Karangsari Tahun Anggaran 2025;
5. Memberikan gambaran tentang arah kebijakan pembangunan tahun 2025 dan ;
6. Memberikan gambaran tentang prioritas program yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD terhadap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Tujuan penyusunan renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau :

- Sebagai media yang dapat dijadikan sumber dasar penyusunan rencana kerja;
- Agar tersedia kelengkapan dokumen perencanaan yang akan menjadi arah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi latar belakang dan landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta uraian singkat tentang sistematika penulisan Renstra.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN;

Memuat Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah, Arah Kebijakan Tahun 2025 Berdasarkan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025, Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD selama kurun waktu tahun 2021-2026.

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023, Jumlah Program/Kegiatan di Renja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Kepri program 2 (dua), kegiatan : 14 (empat belas) dan sub kegiatan : 54 (lima puluh empat). Jumlah program/Kegiatan DPPA Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Kepri: program : 2 (dua), kegiatan : 14 (empat belas) dan sub kegiatan : 43 (tiga puluh tiga). dapat diartikan keselarasan antara program pada Renja dan DPA, disini sekretariat dewan masih konsistensi pada dokumen perencanaan yang telah tersedia.

Rata-rata capaian kinerja indikator kegiatan perangkat daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kepri di Triwulan I : 29,26 %, Triwulan II : 19,26 %, Triwulan III : 9,26 % dan Triwulan IV : 39,26 %. Rata-rata capaian keuangan Sekretariat DPRD Provinsi Kepri sampai dengan Triwulan I : 19,26 %, Triwulan II : 19,26 %, Triwulan III : 9,26, Triwulan IV : 39,26. Sekretariat DPRD Provinsi Kepri di triwulan IV ini terdapat 2 (dua) Sub Kegiatan yang capaian kinerjanya rendah atau tidak mencapai target diantaranya : Pelaksanaan Medical Check Up DPRD, Pendalaman Tugas DPRD, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah.

Kendala atau permasalahan terhadap capaian kegiatan yang tidak mencapai target :

- 1) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD sebanyak 35 orang anggota DPRD tidak menggunakan fasilitas medical check up. Sekretariat DPRD akan berbenah dan memberikan informasi tentang penyediaan fasilitas medical check up terhadap anggota DPRD
- 2) Pendalaman Tugas DPRD secara capaian target tercapai dari 45 Orang anggota DPRD yang mendapati pembekalan teknis tugas dan fungsi. Tingginya aktivitas anggota DPRD baik di komisi, fraksi sehingga terjadinya benturan jadwal dalam melaksanakan bimtek, sehingga bimtek ini dikesampingkan maka terjadinya tidak optimal dan tidak efisien dalam penggunaan anggaran.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renja sampai dengan triwulan IV Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 mengelola anggaran belanja langsung pada tahun 2023 adalah

sebesar Rp.159,974,696,588.00 sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 terserap sebesar Rp.155,538,538,525,65 (97,09%) Anggaran tersebut digunakan untuk 2 Program dengan realisasi anggaran dan realisasi kinerja masing-masing program dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Hasil terhadap Renja PD Lingkup
Provinsi Renja OPD Sekretariat DPRD Provinsi
Kepulauan Riau Periode Pelaksanaan: 2023

No	Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan dan Sub	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output) (PERUB AHAN RPJMD 2023)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun lalu 2023			Target Progra m dan Kegiatan (Renja OPD tahun 2024)	Target Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun Berjalan		Satua n
							Target Renja OPD tahun 2023	Realisa si Renja OPD tahun 2023	Ting kat Real isasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %	
	1	2	3A	3B	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(4+5+7+9)	11=(10/4)	
I	4. 02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Per sen)	100%	100%	100%	100%	1	100%			
				Persentase Pelaksanaa n Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Per sentase)						100%			
1	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokume n	1	1Dokumen			

1	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1	1Dokumen	1	1	
2	4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1	1Dokumen	1	1	
3	4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1Dokumen	1	1Dokumen	1	1	
4	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	
5	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	
2	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya		100 %	100%	100 %	100%	1	100%			

	4.02.01.1.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Orang/Bulan 14	Orang/Bulan 14	Orang/Bulan 14	14	1	Orang/Bulan 74	1	1	
	4.02.01.1.02.0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4.02.01.1.02.0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4.02.01.1.02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4.02.01.1.02.0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
3	4. 02. 01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		100%	100%	100%	100%	1	100%			
	4. 02. 01. 1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1		1	1	

	4. 02. 01. 1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	1	60 Orang			
	4. 02. 01. 1.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		60 Orang	60 Orang					1	1	
	4. 02. 01. 1.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	1	60Orang	1	1	
4	4. 02. 01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1	100%			
	4. 02. 01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	1 Paket	1	1	
	4. 02. 01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	1Paket	1	1	
	4. 02. 01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	

	4. 02. 01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	1 Laporan				1 Laporan	1	1	
	4. 02. 01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan		10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit		100%			
	4. 02. 01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Paket	1 Paket					1	1	
	4. 02. 01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Unit 15	Unit 15	Unit 15	Unit 15	1		1	1	
	4. 02. 01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		Unit 1	Unit 1	Unit 1	Unit 1	1		1	1	
	4. 02. 01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Unit 1	Unit 1	Unit 1	Unit 1	1		1	1	
	4. 02. 01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang		Unit 6	Unit 6	Unit 6	Unit 6	1	6 Unit	1	1	

			Disediakan										
	4. 02. 01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1	12Bulan			
	4. 02. 01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	
	4. 02. 01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	
	4. 02. 01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kondisi baik		100 %	100 %	100 %	100 %		100%			
	4. 02. 01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		60 Unit	60 Unit							

	4. 02. 01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		60 Unit	60 Unit	60 Unit	60 Unit	1	60 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		5 Unit	5 Unit							
	4. 02. 01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1	5 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		500 Unit	500 Unit	500 Unit	500 Unit	1	500 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	4 Unit							

	4. 02. 01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	4 Unit							
	4. 02. 01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	1	8 Unit	1	1	
	4. 02. 01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya		100 %	100 %	100 %	100 %	1	100%			
	4. 02. 01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		Orang/Bulan 13	Orang/Bulan 13	Orang/Bulan 13	Orang/Bulan 13	1	Orang/Bulan 13	1	1	
	4. 02. 01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	1 Paket	1	1	
	4. 02. 01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	1	45 Orang	1	1	

	4. 02. 01.1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPR		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1	100%			
	4. 02. 01.1.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	1	1	
	4. 02. 02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD		80 Skor	80 Skor	72 Skor	80 Skor	1.11	74 Skor			
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 %			
	4. 02. 02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1	100%			
	4. 02. 02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	

	4. 02. 02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda		7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	1	7 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.01.04	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1	100%			
	4. 02. 02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1	2 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan		100 %	100 %	100 %	100 %	1	100%			

	4. 02. 02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli		36 Orang	36 Orang					1	1	
	4. 02. 02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi		36 Orang	36 Orang	36 Orang	36 Orang	1	36 Orang	1	1	
	4. 02. 02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil		7 Dapil	7 Dapil	7 Dapil	7 Dapil	1	100%			
	4. 02. 02.1.05.01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1		1	1	

	4. 02. 02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	
	4. 02. 02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD secara optimal		100 %	100 %	100 %	100 %	1	100 %			
	4. 02. 02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100 %	1	1	
	4. 02. 02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	100 %	1	1	
	4. 02. 02.1.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	100 %	1	1	
	4. 02. 02.1.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	1	1	

2.2 Analisin Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

No	Indikator	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian			proyeksi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Skors	70	72	74	76	78	80	70	72	74	76
2	Persentase pelaksanaan sidang dan risalah DPRD	%	96	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	n/a	100	100	100	100	100	n/a	100	100	100
4	Persentase fasilitasi penyusunan laporan DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase pelaksanaan kebijakan anggaran terfasilitasi	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase layanan administrasi keuangan DPRD	%	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100
7	Persentase pengumpulan data kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase kecukupan sarana prasarana	%	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100
10	Penyediaan tenaga ahli yang dibutuhkan DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase ketersediaan layanan kepegawaian	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase kecukupan penunjang fasilitas	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase ketersediaan kelancaran perkantoran	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase pemeliharaan milik daerah	%	96	100	100	100	100	100	96	100	100	100
15	Persentase Ketersediaan layanan administrasi DPRD	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Rata-rata capaian kinerja indikator kegiatan perangkat daerah Sekretariat DPRD Provinsi Kepri di Triwulan I : 29,26 %, Triwulan II : 19,26 %, Triwulan III : 9,26 % dan Triwulan IV : 39,26 %.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil evaluasi Renstra dan penelaahan terhadap tugas, fungsi dan kewenangan maka dapat disampaikan bahwa permasalahan di Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Struktur organisasi	Permasalahan yang Dihadapi
Umum dan Kehumasan	1. Lemahnya manajemen panganan administrasi surat menyurat 2. Keberadaan Sarana dan Prasarana pelayanan yang belum memadai 3. Pelayanan yang belum optimal dan tepat sasaran 4. Minimnya sarana baca dan referensi 5. Pola penanganan keprotokolan yang belum profesional dan tepat 6. Tidak terkelolanya data base dokumentasi
Persidangan, Perundang-undangan dan Alat Kelengkapan Dewan	1. Sarana dan prasarana persidangan yang belum optimal 2. SDM yang kurang memadai dan responsif dalam pelayanan persidangan dan produk hukum.
Kuangan, Perencanaan dan Anggaran	1. Sistem pertanggung jawaban yang belum tertata dengan baik 2. Terbatasnya kemampuan teknis aparat dalam mengelola dan menganalisis data 3. Penguasaan teknologi informasi Pegawai masih rendah dan belum dapat memenuhi tuntutan tugas 4. Kemampuan dan kesiapan dalam verifikasi data yang perlu dipertajam dan lebih teliti

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD dan RKPD. Dimana dalam proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah di setuju di dalam pelaksanaan APBD tahun 2025, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan-perubahan mengenai Peraturan-peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 tabel 2.1

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	100 %	75,787,439,711						
			Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terasilitasi (Dengan Satuan:Persen tase	100 %							
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1 Dokumen	670,000,000						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	150,000,000						

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	165,000,000						
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	165,000,000						
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20,000,000						
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	170,000,000						
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	100%	15,355,466,028						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/Bulan	13,825,466,028						
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1,000,000,000						

3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	180,000,000						
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	180,000,000						
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	170,000,000						
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	100 %	1,100,000,000						
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	500,000,000						
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	300,000,000						
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	150,000,000						

4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	150,000,000						
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100 %	12,362,793,231						
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000,000						
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,000,000,000						
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5,062,793,231						
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,300,000,000						
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah aset yang diadakan	100 %	3,000,000,000						
1	Pengadaan Mebel	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50,000,000						

2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kepulaua n Riau, KEPULAU AN RIAU)	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	50,000,000						
3	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	(Kepulaua n Riau, KEPULAU AN RIAU)	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1,450,000,000						
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulaua n Riau, KEPULAU AN RIAU)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50,000,000						
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulaua n Riau, KEPULAU AN RIAU)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1,400,000,000						
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayan	100 %	7,037,900,000						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	(Kepulaua n Riau, KEPULAU AN RIAU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2,000,000,000						
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	(Kepulaua n Riau, KEPULAU AN RIAU)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,037,900,000						
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase sarana prasarana	100%	3,940,000,000						

	Daerah		kondisi baik								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	60 Unit	50,000,000.00						
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	1,990,000,000.00						
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit 5	50,000,000.00						
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit 8	700,000,000.00						
7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Aset dalam Pemeliharaan	500 Unit	700,000,000						
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	200,000,000.00						
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	4 Unit	200,000,000.00						

			ilitasi								
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	50,000,000.00						
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya	100%	31,921,280,452						
1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/ Bulan	30,971,280,452						
2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket	650,000,000						
3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 orang	300,000,000						
9	Layanan Adminstrasi DPRD		Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD	100%	400,000,000.00						
1	Fasilitasi Fraksi DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Laporan	400,000,000.00						
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah	100%	69,434,074,648						

			DPRD (Dengan Satuan: Persentase)								
10	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	3 Dokumen	600,000,000						
1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	200,000,000						
2	Pembahasan Rancangan Perda	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	1 Dokumen	200,000,000						
3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	100,000,000						
4	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	1 Dokumen	100,000,000						
11	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)	100%	200,000,000						
1	Pembahasan APBD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Terlaksananya Pembahasan APBD	2 Dokumen	200,000,000						

12	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Jumlah sub kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	100%	6,635,881,686						
1	Pendalaman Tugas DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 Dokumen	926,881,686						
2	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	950,000,000						
3	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang	50,000,000						
4	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	36 Orang	3,209,000,000						
5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	1,500,000,000						
13	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil	100%	29,100,000,000						
1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1Laporan	50,000,000						

2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	50,000,000						
3	Pelaksanaan Reses	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	1 Dokumen	29,000,000,000						
14	Fasilitasi Tugas DPRD		Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD Secara Optimal	100%	32,898,192,962						
1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 Dokumen	30,748,192,962						
2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	200,000,000						
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	250,000,000						
4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1,700,000,000						
					145,221,514,359						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kepri pada tahun 2025, merupakan hasil dari proses perencanaan yang terukur sesuai kebutuhan (musrenbag prov) yang berdoman pada Isu Strategis dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu – isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

No	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang seperti Perangkat Daerah lainnya berada di bawah Kementrian Dalam Negeri, akan tetapi Sekretariat DPRD mempunyai tugas yang berbeda yaitu selain melaksanakan perintah dari Pemerintah Daerah secara operasional juga memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD. Di dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Karena DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan sejajar dan merupakan mitra kerja Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah yang sinergis dengan kebijakan Pemerintahan Provinsi maupun Pusat. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut diatas maka produk hukum atau peraturan daerah yang ditetapkan diharapkan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan diatasnya, mempunyai rasa keadilan, pemerataan dan diarahkan, yang implementasinya akan dapat berdampak pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.

3.2 Arah Kebijakan Tahun 2025 berdasarkan dokumen PERUBAHAN- RPJMD tahun 2021-2026

Berdasarkan isu strategis RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Pembangunan daerah pada Tahun 2025 diarahkan pada **“Optimalisasi potensi Sumner Daya Alam secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi keraknyatan.”**

3.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Pada tahun 2025 diharapkan roda perekonomian sudah pulih dan mengalami peningkatan yang pesat, sehingga perlu terus ditingkatkan dengan tambahan investasi serta penguatan daya saing Daerah. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun 2025 ini ialah :

1. Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah.
2. Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya.
3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah.

NO	ISU STRATEGIS	PRIORITAS RKPD
1	Peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagaipenggerak perekonomianprovinsi kepulauan kepri	Optimalisasi Potensi Perekonomian Daerah.
2	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan serta pelayanan yang berkualitas kesehatan	Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya
3	Peningkatan dan optimalisasi SDM yang berdaya saimg dan profesioanal	
4	Peningkatan dan pengembangan budaya melayu dalam implementasi pembangunan di provinsi kepulauan riau	
5	Pembangunan dan pemanfaatan suber daya alam yang berkulitas dan ramah lingkungan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah
6	Identifikasi dan kompetensi birokrasi secara profesional dan proporsional	
7	Penataan kawasan kumuh pesisir dan pengentasan kemiskinan	
8	Peningkatan dan pemerataan pembangunan untuk meminimalisirkesenjangan pembangunan antar wilayah	

3.4 Tujuan dan sasaran Renja Sekretaria DPRD

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan

tersebut. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi dan terkait dengan Tujuan dalam Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau. Untuk itu, maka Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

Tujuan/Sasaran Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran Daerah	Tujuan	Sasaran PD /Sasaran Program	Indikator tujuan/ Sasaran/Program	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target			
								2024	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan yang Optimal Sekretariat Dewan		Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	(Hasil Survey Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD : Sumber Data Laporan Akhir Kegiatan)	Skor	72	76	76	78	80	80
Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja		Meningkatnya Layanan Sekretariat DPRD dan Layanan Anggota DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Terlaksananya Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Persentase Pelaksanaan Sidang dan Risalah DPRD	Realisasi jumlah spesifikasi produk pelayanan fasilitasi rapat yang dilaksanakan dibagi dengan Target jumlah spesifikasi produk pelayanan fasilitasi rapat dikalikan 100%	Persentase	100	100	100	100	100	100
			Tercapainya Indikator Kinerja Bidang Urusan Sekretariat DPRD	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan	(Rata-rata Capaian seluruh indikator kinerja urusan) realisasi capaian kinerja : target kinerja X100	Persentase	100	100	100	100	100	100
			Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi	Realisasi jumlah spesifikasi tugas dan fungsi yang dilaksanakan dibagi dengan Target jumlah spesifikasi tugas dan fungsi dikalikan 100%.	Persentase	100	100	100	100	100	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Program merupakan sebuah instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh Perangkat Daerah. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan serta sasaran pembangunan. Kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Setiap program memiliki indikator kinerja outcome, sedangkan kegiatan memiliki indikator kinerja output. Berikut ini adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD selama kurun waktu tahun 2021-2026.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan :

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan :

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan :

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya

6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kegiatan :

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
3. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

Kegiatan :

9. Layanan Administrasi DPRD

Sub Kegiatan :

1. Fasilitasi Fraksi DPRD

II. PROGRAM DUKUNGANPELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Kegiatan :

10. Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
2. Pembahasan Rancangan Perda
3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
4. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

11. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Sub Kegiatan :

1. Pembahasan APBD

Kegiatan :

12. Peningkatan Kapasitas DPRD

Sub Kegiatan :

1. Pendalaman Tugas DPRD
2. Publikasi dan Dokumentasi DPRD
3. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
5. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Kegiatan :

13. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Sub Kegiatan :

1. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3. Pelaksanaan Reses

Kegiatan :

14. Fasilitasi Tugas DPRD

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel . 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat DPRD Provinsi Kepri

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	4. 02. 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan (Dengan Satuan:Persen)	Persentase		100 %	75,787,439,711			100 %	78,061,062,902
			Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Persentase	Persentase		100 %				100 %	
1	4. 02. 01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen		1Dokumen	670,000,000			1Dokumen	820,000,000
1	4. 02. 01. 1.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	150,000,000	APBD		1Dokumen	200,000,000
2	4. 02. 01. 1.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	165,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	4. 02. 01. 1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	165,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
4	4. 02. 01. 1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	20,000,000	APBD		1 Laporan	20,000,000
5	4. 02. 01. 1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	170,000,000	APBD		1 Laporan	200,000,000
2	4. 02. 01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang terpenuhi hak keuangannya	Persentase		100%	15,355,466,028			100%	15,425,466,028
6	4. 02. 01. 1.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	74 Orang/Bulan	13,825,466,028	APBD		80 Orang/Bulan	13,825,466,028
7	4. 02. 01. 1.02. 01	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	1,000,000,000	APBD		1 Dokumen	1,000,000,000
8	4. 02. 01.	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen	Dokumen	(Kepulauan Riau,	1 Dokumen	180,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.02. 03	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		KEPULAUAN RIAU)						
9	4. 02. 01. 1.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	180,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
10	4. 02. 01. 1.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	170,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
3	4. 02. 01. 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase		100 %	1,100,000,000			100 %	1,500,000,000
11	4. 02. 01. 1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Paket	500,000,000	APBD		1 Paket	650,000,000
12	4. 02. 01. 1.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	60 Orang	300,000,000	APBD		60 Orang	450,000,000
13	4. 02. 01. 1.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	60 Orang	150,000,000	APBD		60 Orang	200,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	4. 02. 01. 1.05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	60 Orang	150,000,000	APBD		60 Orang	200,000,000
4	4. 02. 01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur			100 %	12,362,793,231			100 %	13,612,007,342
15	4. 02. 01. 1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Paket	1,000,000,000	APBD		1 Paket	1,850,000,000
16	4. 02. 01. 1.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Paket	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Paket	5,000,000,000	APBD		1 Paket	5,262,007,342
17	4. 02. 01. 1.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Kunjungan Tamu	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	5,062,793,231	APBD		1 Laporan	5,000,000,000
18	4. 02. 01. 1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	1,300,000,000	APBD		1 Laporan	1,500,000,000
5	4. 02. 01. 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset yang diadakan			100 %	3,000,000,000			100 %	3,000,000,000
19	4. 02. 01. 1.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Paket	50,000,000	APBD		1 Paket	50,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					RIAU)						
20	4. 02. 01. 1.07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	15 Unit	50,000,000	APBD		15 Unit	50,000,000
21	4. 02. 01. 1.07. 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Unit	1,450,000,000	APBD		1 Unit	1,450,000,000
22	4. 02. 01. 1.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	50,000,000
23	4. 02. 01. 1.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	6 Unit	1,400,000,000	APBD		6 Unit	1,400,000,000
6	4. 02. 01. 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan kebutuhan penunjang penyelenggaraan pelayanan			100 %	7,037,900,000			100 %	7,037,900,000
24	4. 02. 01. 1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	2,000,000,000	APBD		1 Laporan	2,000,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	4. 02. 01. 1.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	5,037,900,000	APBD		1 Laporan	5,037,900,000
7	4. 02. 01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana prasarana kondisi baik			100%	3,940,000,000			100%	4,344,409,080
26	4. 02. 01. 1.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	60 Unit	50,000,000.00			60 Unit	50,000,000.00
27	4. 02. 01. 1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	60 Unit	1,990,000,000.00	APBD		60 Unit	2,794,409,080.00
28	4. 02. 01. 1.09. 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Unit 5	50,000,000.00	APBD		Unit 5	50,000,000.00
29	4. 02. 01. 1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	Unit 8	700,000,000.00	APBD		Unit 8	500,000,000.00
30	4. 02. 01. 1.09. 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset dalam Pemeliharaan	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	500 Unit	700,000,000	APBD		500 Unit	500,000,000.00

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31	4. 02. 01. 1.09. 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	4 Unit	200,000,000.00	APBD		4 Unit	200,000,000.00
32	4. 02. 01. 1.09. 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	4 Unit	200,000,000.00	APBD		4 Unit	200,000,000.00
33	4. 02. 01. 1.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	8 Unit	50,000,000.00	APBD		8 Unit	50,000,000.00
8	4. 02. 01. 1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase pimpinan dan anggota dprd yang terpenuhi hak keuangannya dan kesejahteraanya			100%	31,921,280,452			100%	31,921,280,452
34	4. 02. 01. 1.15. 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	45 Orang/ Bulan	30,971,280,452	APBD		45 Orang/ Bulan	30,971,280,452.00
35	4. 02. 01. 1.15. 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Paket	650,000,000	APBD		1 Paket	650,000,000.00
36	4. 02. 01. 1.15. 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	45 orang	300,000,000	APBD		45 orang	300,000,000.00

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	4. 02. 01. 1.16	Layanan Adminstrasi DPRD	Pemenuhan kebutuhan administrasi DPRD			100 %	400,000,000.00			100 %	400,000,000.00
37	4. 02. 01. 1.16. 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Laporan	400,000,000	APBD		1 Laporan	400,000,000
	4. 02. 02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	"Persentase Pelaksanaan Sidang dan RisalahDPRD (Dengan Satuan:Persentase)"			100 %	69,434,074,648			100 %	73,174,076,926
10	4. 02. 02. 1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah Ranperda dalam Propemperda yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)			100%	600,000,000			100%	1,000,000,000
38	4. 02. 02. 1.01. 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
39	4. 02. 02. 1.01. 01	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	200,000,000	APBD		1 Dokumen	200,000,000
40	4. 02. 02. 1.01. 01	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	300,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41	4. 02. 02. 1.01. 01	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	300,000,000
11	4. 02. 02. 1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah (APBD DAN APBD P)			100%	200,000,000			100%	100,000,000
42	4. 02. 02. 1.02. 01	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	2 Dokumen	200,000,000			2 Dokumen	100,000,000
12	4. 02. 02. 1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Persentase)			100%	6,635,881,686			100%	8,036,813,568
43	4. 02. 02. 1.04. 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Luar (Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	926,881,686	APBD		1 Dokumen	1,994,371,586
44	4. 02. 02. 1.04. 03	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	950,000,000	APBD		1 Dokumen	1,150,000,000
45	4. 02. 02. 1.04. 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	36 Orang	50,000,000	APBD		36 Orang	50,000,000

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
46	4. 02. 02. 1.04. 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	36 Orang	3,209,000,000	APBD		36 Orang	3,209,000,000
47	4. 02. 02. 1.04. 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	1,500,000,000	APBD		1 Dokumen	1,633,441,982
13	4. 02. 02. 1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terlaksananya penyerapan aspirasi Masyarakat di seluruh Dapil			100%	29,100,000,000			100%	29,100,000,000
48	4. 02. 02. 1.05. 01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1Laporan	50,000,000	APBD		1Laporan	50,000,000
49	4. 02. 02. 1.05. 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	50,000,000	APBD		1 Dokumen	50,000,000
50	4. 02. 02. 1.05. 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	(Kepulauan Riau, KEPULAUAN RIAU)	1 Dokumen	29,000,000,000	APBD		1 Dokumen	29,000,000,000
14	4. 02. 02. 1.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Tugas dan Fungsi DPRD Secara Optimal			100%	32,898,192,962			100%	34,937,263,358

NO	KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	RENCAN TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAN MAJU TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKAIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
	(1)	(2)	(3)	(3a)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
51	4. 02. 02. 1.08. 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	1 Dokumen	30,748,192,962	APBD		1 Dokumen	32,687,263,358
52	4. 02. 02. 1.08. 03	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	1 Laporan	200,000,000	APBD		1 Laporan	200,000,000
53	4. 02. 02. 1.08. 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	1 Dokumen	250,000,000	APBD		1 Dokumen	250,000,000
54	4. 02. 02. 1.08. 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	(Luar Wilayah, KEPULAUAN RIAU	1 Dokumen	1,700,000,000	APBD		1 Dokumen	1,800,000,000
							145,221,514,359				151,235,139,828

BAB V

PENUTUP

RENJA – Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah disajikan ini merupakan kelengkapan yang harus dipenuhi oleh Instansi Pemerintah. Diharapkan Renja ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memberikan pelayanan kepada DPRD dalam menjalankan tugas, wewenang serta hak dan kewajibannya dapat dilaksanakan dengan baik. Namun demikian Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau harus selalu tampil dengan pelayanan prima sebagai fasilitator DPRD pada setiap kegiatan

Tanjungpinang, Februari 2024
SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



MARTIN L. MAROMON, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196703061997031004